



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 164 TAHUN 2016**

**TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD);
 - b. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

F. O

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

7.9 ³

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
10. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut kebijakan akuntansi, terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
13. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah suatu pedoman atau acuan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya fungsi akuntansi yang menjelaskan tentang siapa melakukan apa dan sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana.
14. Sistem Akuntansi SKPD adalah prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, yang menjelaskan langkah demi langkah melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh SKPD.
15. Sistem Akuntansi PPKD adalah prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, yang menjelaskan langkah demi langkah melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh PPKD sebagai pengguna anggaran .
16. Sistem Akuntansi Konsolidasian adalah prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh PPKD sebagai konsolidator laporan keuangan pemerintah daerah.
17. Sistem Akuntansi Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa BUD Aset Tetap adalah prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaporan aset tetap dan aset lainnya yang belum ditetapkan status penggunaannya.
18. Proses Akuntansi adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dari pencatatan setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai dengan pengikhtisaran transaksi dan/atau kejadian keuangan tersebut.

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
21. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas transaksi keuangan PPKD.
27. Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
28. Entitas akuntansi terdiri dari BUD, PPKD, Kuasa BUD Aset Tetap, dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah
29. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
30. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
31. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil.
32. Jurnal adalah catatan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara kronologis.
33. Buku Besar adalah kumpulan rekening/akun/perkiraan, digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.
34. Buku Besar Pembantu adalah kumpulan rincian rekening/akun/perkiraan, digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

7-0 5

35. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
36. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.
37. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
38. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
39. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
40. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi- koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
41. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- c. Sistem Akuntansi SKPD;
- d. Sistem Akuntansi PPKD;
- e. Bagan Akun Standar

BAB III SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup pengertian umum, ruang lingkup dan definisi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.
- (2) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diakuntansikan dan dokumen

pendukungnya dikelola secara tertib sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan daerah.

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
- (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun.
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok.
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis.
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selanjutnya dikelola oleh PPKD termasuk penyesuaian apabila terjadi perubahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan keputusan Sekretaris Daerah.

7
F-0 ✓

Pasal 7

Periode akuntansi pemerintahan daerah meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada Sistem Akuntansi SKPD meliputi:
 - a. Prosedur akuntansi pendapatan- LO dan Pendapatan - LRA SKPD;
 - b. Prosedur akuntansi beban dan belanja SKPD;
 - c. Prosedur akuntansi piutang SKPD;
 - d. Prosedur akuntansi persediaan SKPD;
 - e. Prosedur akuntansi aset SKPD;
 - f. Prosedur akuntansi kewajiban SKPD;
 - g. Prosedur akuntansi ekuitas SKPD;
 - h. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
 - i. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada Sistem Akuntansi PPKD meliputi:
 - a. Prosedur akuntansi pendapatan- LO dan Pendapatan - LRA PPKD;
 - b. Prosedur akuntansi beban dan belanja PPKD;
 - c. Akuntansi Transfer PPKD;
 - d. Akuntansi Pembiayaan PPKD;
 - e. Akuntansi Aset PPKD;
 - f. Akuntansi Kewajiban PPKD;
 - g. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD;
 - h. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;
 - i. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD;
 - j. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional.
 - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan.

Bagian Kedua Proses Akuntansi

Pasal 9

- (1) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.

f. a. 8

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah unit yang melaksanakan fungsi akuntansi menerima bukti transaksi yang sah.

BAB IV PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. Laporan akuntansi SKPD:
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 2. Laporan Keuangan Interim;
 3. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Operasional;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan ;
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Laporan akuntansi PPKD :
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 2. Laporan Keuangan interim;
 3. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Operasional;
 - c) Neraca ;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan;
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan;
 - f) Laporan Perubahan SAL (LP-SAL);
 - g) Laporan Arus Kas.
 - c. Laporan yang dihasilkan sebagaimana pada ayat (1) diatas dikonsolidasikan menjadi laporan entitas pelaporan yang meliputi:
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 2. Laporan Keuangan Interim;
 3. Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Laporan Operasional;
 - d) Neraca;
 - e) Laporan Perubahan Ekuitas;

- f) Laporan Arus Kas; dan
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan interim entitas akuntansi SKPD, PPKD, Konsolidator dan BUD disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir kepada Walikota melalui PPKD.
- b. Laporan keuangan interim entitas pelaporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Walikota.
- c. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan oleh SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada Walikota melalui PPKD.
- d. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada DPRD.
- e. Laporan Keuangan Tahunan SKPD disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Walikota melalui PPKD.
- f. Laporan Keuangan Tahunan PPKD dan Konsolidasian yang disusun PPKD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Walikota.
- g. Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) BPKAD memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13



Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 NOVEMBER 2016

 PIt. WALIKOTA PEKANBARU, 

 EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 NOVEMBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 164

PENDAHULUAN

A. UMUM

Akuntansi adalah suatu sistem, di mana sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Sistem bekerja dengan mengolah masukan (input) berupa bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen dan formulir menjadi keluaran (output) berupa laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) adalah suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam Buku Jurnal, memposting ke Buku Besar, menyusun Neraca Saldo, menyusun Kertas Kerja Konsolidasian dan diakhiri dengan menyusun Laporan Keuangan.

SAPD disusun dengan tujuan agar petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar, mengetahui siapa melakukan apa, menegaskan transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana pencatatannya.

B. RUANG LINGKUP

1. Pihak-pihak yang terkait;
2. Dokumen yang digunakan;
3. Siklus Akuntansi;
4. Sistem Akuntansi SKPD;
5. Sistem Akuntansi PPKD;
6. Proses Konsolidasian;
7. Bagan Akun Standar (BAS).

C. DEFINISI




1. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Pekanbaru yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota

Pekanbaru.


4. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
6. **Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
7. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Pekanbaru yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
8. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
9. **Pembiayaan Daerah** adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
10. **Penerimaan Pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
11. **Pengeluaran Pembiayaan** adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
12. **Jurnal Anggaran**, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya dari DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
13. **Jurnal Piutang**, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat transaksi piutang baik atas pengakuan pendapatan-LO maupun pelunasannya oleh bendahara penerimaan.
14. **Jurnal Utang**, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat transaksi utang baik atas pengakuan beban maupun pembayarannya oleh bendahara pengeluaran.
15. **Jurnal Penerimaan Kas**, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan-LRA oleh bendahara penerimaan.
16. **Jurnal Pengeluaran Kas**, jurnal ini digunakan khusus untuk

mencatat transaksi pengeluaran belanja oleh bendahara pengeluaran.

17. **Jurnal Umum**, jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi di luar transaksi piutang, utang, penerimaa kas dan pengeluaran kas, misalnya penyetoran pendapatan dari SKPD ke rekening Kas Daerah, koreksi pembukuan, pengembalian belanja, penerimaan kas dari rekening Kas Daerah, dan lain-lain.
18. **Buku Besar** adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke buku besar disebut posting.
19. **Basis Akrua**l adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

 Plt. WALIKOTA PEKANBARU, 
 EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 NOVEMBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 164